



Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Baubau

FatwaUly Hamuzan Sujana, Andy Arya Maulana Wijaya, L.M. Azhar Sa'ban

Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Koresponding : hamzauly27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut tentang program pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) di Kota Baubau, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan mereka melalui pelatihan keterampilan, akses ekonomi, dan pendampingan sosial. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga di Kota Baubau, yang sebagian besar bekerja di sektor perdagangan, buruh harian, dan usaha perikanan, menghadapi kendala dalam akses pendidikan dan peluang ekonomi. Program pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Baubau berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial perempuan melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan. Meskipun terdapat faktor pendukung seperti kebijakan pemerintah dan program pelatihan keterampilan, tantangan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan beban ganda perempuan kepala keluarga tetap menjadi masalah utama. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pemberdayaan perempuan di Kota Baubau. Diharapkan bahwa program ini akan mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan kepala keluarga serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Kata kunci: Pemberdayaan Perempuan, Kepala Keluarga, Kesejahteraan, PEKKA, Program Pemerintah.

Abstract

This study aims to further examine the empowerment program for Women Heads of Households (PEKKA) in Baubau City, with a focus on improving their welfare through skills training, economic access, and social assistance. In this study, data were collected through a descriptive qualitative approach involving interview, observation, and document study methods. The results of the study show that female heads of families in Baubau City, most of whom work in the trade, daily laborer and fisheries sectors, face obstacles in accessing education and economic opportunities. The empowerment program for female heads of households implemented by the Baubau City Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) focuses on increasing women's economic and social capacity through training, mentoring, and institutional strengthening. Despite supporting factors such as government policies and skills training programs, challenges such as budget constraints, low quality human resources, and the double burden of female heads of households remain major issues. Collaboration between government, community and private sector is very important to create a more conducive environment for women's empowerment in Baubau City. It is hoped that this program will improve the quality of life of female heads of households and contribute to more inclusive and gender-equitable development.

Keyword: Women Empowerment, Head of Family, Welfare, PEKKA, Baubau City, Gender, Government Programs.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara demokrasi dengan populasi yang tersebar luas di berbagai pulau. Posisi geografis negara yang unik membuat usaha mengurangi angka kemiskinan menjadi suatu tantangan tersendiri. Salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memberdayakan masyarakat Indonesia sendiri, Menurut Usman, (dalam Mulyono 2012) menyebutkan bahwa "Pemberdayaan adalah suatu proses pembelajaran masyarakat untuk mengoptimalkan seluruh potensi agar dapat berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan".

Kualitas hidup dan peran perempuan di Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, yang berkontribusi terhadap adanya kesenjangan gender dalam pembangunan. Salah satu aspek pembangunan yang telah dirumuskan dalam GBHN yaitu pembangunan pemberdayaan perempuan. Permasalahan yang di-kemukakan adalah adanya ketidakadilan dan ketidak setaraan gender yang diakui sebagai salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi perempuan kepala keluarga adalah pembangunan yang seringkali mendiskriminasi mereka sehingga mengakibatkan perempuan kepala keluarga tidak sepenuhnya menerima pengakuan hak dan kekuasaan yang sama seperti laki-laki sebagai kepala keluarga (Ernawati, 2013:161). Perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga sering kali menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah Keterbatasan akses ke sumber daya yang dimaksud meliputi modal (Fanaqi et al., 2023), serta pendidikan dan pelatihan yang berkualitas (Anto et al., 2023). Dalam berbagai situasi, perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga sering kali mengalami ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang kerja yang menguntungkan, yang umumnya lebih mudah dijangkau oleh laki-laki (Hasan et al., 2018). Hal ini tidak jarang menyebabkan mereka terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan kondisi kerja yang kurang memadai.

Banyak faktor yang memengaruhi tantangan yang dihadapi perempuan kepala keluarga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain memiliki pengaruh yang signifikan, pendidikan terkadang kurang dihargai dan menjadi objek prasangka sosial. Hal ini disebabkan banyak perempuan hanya mampu menyelesaikan pendidikan yang sangat rendah, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan ketergantungan finansial mereka kepada pasangannya. Oleh karena itu, melalui program pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA), pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang dipimpin oleh perempuan.

Ketika menjadi janda, otomatis seseorang memikul tanggung jawab menafkahi keluarganya dan mengubah statusnya menjadi kepala rumah tangga. Perempuan kepala rumah tangga sering disebut dengan ungkapan ini. Mereka harus mempertimbangkan caranya

Mereka memutuskan untuk mengejar karir atau bisnis sebagai sarana untuk melanjutkan kehidupan mereka. Pemerintah juga hadir untuk menyediakan dana untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan menyediakan kegiatan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka; Hal ini dikenal dengan program PEKKA (Kepala Keluarga Perempuan).

Pada dasarnya, perempuan adalah pilar kemajuan suatu bangsa, menjadi central dalam pembangunan. Masa depan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas perempuan yang ada di dalamnya. Peran perempuan sebagai ibu memiliki signifikansi yang mendalam dalam proses pertumbuhan dan perkembangan generasi muda, yang merupakan calon pemimpin di masa depan. Apabila suatu bangsa memiliki perempuan-perempuan yang berkualitas dan beretika baik, maka hal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa tersebut (Wasilah, 2016, hal. 3).

Seorang wanita dapat menjadi kepala rumah tangga karena berbagai alasan, seperti perceraian, kepergian suami dari keluarga, kehamilan dan persalinan setelah kepergian suami, atau kematian suami.

Setiap Negara pasti mengharapkan kesejahteraan bagi rakyatnya, untuk mencapai

kesejahteraan tersebut dibutuhkan suatu proses yang panjang. Oleh karena itu, proses tersebut seharusnya dimulai dari unit terkecil, salah satunya dari unit keluarga. Keluarga berperan sebagai unit dasar dalam suatu kelompok masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (Telaumbanua & Nugraheni, 2018). Setiap anggota dalam sebuah keluarga memiliki peran yang unik. Dalam konteks ini, peran seorang ayah di dalam keluarga mencakup fungsi sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, penyedia rasa aman, serta sebagai kepala keluarga. Sementara itu, seorang ibu berperan sebagai pengurus rumah tangga, pelindung, pengasuh, dan pendidik bagi anak-anaknya, sedangkan peran anak adalah sebagai dukungan psikososial yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka (Jhonson, 2010).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Menurut Tanjung (2007:63), Metode Kualitatif adalah metode yang dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Kaidah penelitian kualitatif dimaksudkan untuk dapat menghasilkan deskripsi terkait Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kota Baubau. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumen yang relevan. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Baubau, Kelompok PEKKA Kota Baubau dan masyarakat yang dipilih secara Purposive Sampling. Dalam melaksanakan analisis data, digunakan pendekatan analisis kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh miles dan huberman (1992, h. 20). Proses ini mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Perempuan Kepala Keluarga di Kota Baubau

Kota Baubau adalah sebuah kota yang terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Dikenal sebagai “kota Seribu Benteng”, Baubau memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang unik. Pada tahun 2023, Kota Baubau memiliki total luas wilayah sebesar 387,47 km², di mana luas daratan mencapai 290,68 km² dan dihuni oleh penduduk sebanyak 160.232 jiwa, yang terdiri dari 79.627 laki-laki dan 80.605 perempuan. Penduduk ini tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 43 kelurahan yang meliputi Kecamatan Betoambari, Wolio, Sorawolio, Bungi, Kokalukuna, Murhum, Lealea dan Batupuaru. Berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan di Kota Baubau melebihi jumlah penduduk laki-laki. Perempuan yang menjadi kepala keluarga di Kota Baubau adalah sosok yang kuat, menjalankan dua peran sekaligus sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga. Mereka umumnya terdiri dari janda, perempuan yang ditinggalkan pasangan, atau perempuan yang menjadi tumpuan keluarga karena kondisi tertentu. Dalam masyarakat Baubau, yang memiliki tradisi dan budaya lokal yang kental, perempuan kepala keluarga sering kali menunjukkan kemandirian dan ketekunan untuk menghidupi keluarga mereka, Mata Pencarian:

1. **Sektor perdagangan**, Banyak perempuan kepala keluarga menjadi pedagang di pasar tradisional, menjual kebutuhan pokok, hasil laut, kerajinan khas Buton (seperti tenun), atau barang-barang rumah tangga. Sebagian menjalankan usaha kecil seperti warung makan, jualan kue, atau produk makanan lokal khas Baubau.
2. **Pekerja harian**, Sebagian bekerja sebagai buruh harian, buruh tani, atau pembantu rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
3. **Usaha perikanan**, Mengingat Baubau adalah kota pesisir, ada pula perempuan kepala keluarga yang terlibat dalam sektor perikanan, seperti menjual ikan di pasar atau mengolah hasil laut menjadi produk olahan.

4. **Pekerja formal**, Sebagian kecil perempuan kepala keluarga bekerja di sektor formal, seperti pegawai negeri sipil, guru, atau karyawan swasta, meskipun akses ke pekerjaan ini sering kali lebih sulit.

Perempuan kepala keluarga di Baubau menunjukkan semangat juang yang tinggi meskipun sering dihadapkan pada berbagai keterbatasan, seperti akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi yang setara. Mereka adalah pilar penting dalam komunitas, yang tak hanya menghidupi keluarga tetapi juga berkontribusi pada roda perekonomian lokal. (data profil perkembangan penduduk 2023)

Tabel 1.1. Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Terkategori Miskin Ektrim Tahun 2023 Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah	
		Perempuan Sebagai Kepala Keluarga	Kk
1	Bat uparo	80	458
2	Bet oambar i	39	297
3	Bungi	26	180
4	Kokd ukuna	33	136
5	Lea-Lea	52	385
6	Mur hum	96	555
7	Sor awd io	41	393
8	Wd io	127	886
	Jumlah	494	3290

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau Tahun 2023

Di Kecamatan Batuparo, ada 80 orang jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dengan total KK keseluruhan sebanyak 458 orang, di Kecamatan Betoambari ada 39 orang jumlah perempuan sebagai kepala keluarga yang terdaftar dalam total jumlah kartu keluarga mencapai 297 orang, di kecamatan bungi terdapat 26 perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, dengan total KK yang tercatat sebanyak 180 orang. Sementara itu, di kecamatan kokalukuna, jumlah kepala keluarga perempuan mencapai 33 orang, jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dengan total KK keseluruhan sebanyak 136 orang, di Kecamatan Lea-Lea ada 52 orang jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dengan total KK keseluruhan sebanyak 385 orang, di Kecamatan Murhum ada 96 orang jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dengan total KK keseluruhan sebanyak 555 orang, di Kecamatan Sorawolio ada 41 orang jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dengan total KK keseluruhan sebanyak 393 orang, dan terakhir di Kecamatan Wolio ada 127 orang jumlah perempuan sebagai kepala keluarga dengan total KK keseluruhan sebanyak 886 orang. Jadi jumlah keseluruhan perempuan sebagai kepala keluarga di 8 Kecamatan yaitu 494 orang dengan total keseluruhan KK berjumlah 3290 orang.

Jika di lihat berdasarkan jumlah perempuan sebagai kepala keluarga di Kota Baubau bahwa jumlah terbanyak berada di Kecamatan Wolio yaitu 127 Orang jumlah perempuan sebagai kepala. Gambaran ini juga terlihat di 3 Kecamatan yaitu pada Kecamatan Wolio, Batuparo dan Beteombari.

b. Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Kota Baubau

Pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Kota Baubau dalam penelitian ini adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Baubau. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam mengakses dan mengendalikan sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah agar perempuan dapat mengelola diri mereka sendiri, meningkatkan rasa percaya diri, serta berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam

menyelesaikan permasalahan pembangunan, sekaligus mampu mengembangkan potensi diri mereka (Anonymous, 2010). Menurut Hubeis (2010) dalam Wildan Saugi dan Sumarno (2015:3), pemberdayaan perempuan merupakan perbaikan upaya peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan.

Pemberdayaan perempuan meliputi pemberdayaan psikologis, sosial budaya, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan erat karena terdapat jaringan kerjasama yang memberdayakan satu sama lain antara orang (Onny S. Pujono. 1996) dalam Khairul Azmi (2020; hlm 18).

Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam mewujudkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi yang dimilikinya agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran tentang peran perempuan dalam pembangunan semakin meningkat, yang tercermin dalam penerapan program-program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Hal ini disebabkan oleh pemikiran yang menekankan pentingnya kemandirian bagi perempuan, agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena perempuan adalah sumber daya manusia (SDM) yang sangat penting sehingga keberadaanya di ikut sertakan dalam pembangunan.

Pemberdayaan perempuan memiliki dua ciri utama yaitu, pertama, mencerminkan kepentingan emansipatoris yang mendorong partisipasi kolektif masyarakat dalam pembangunan, kedua, merupakan proses di mana individu atau masyarakat terlibat dalam pencekungan, penyadaran, dan pengorganisasian kolektif agar dapat berpartisipasi secara aktif (Zakiyah; 2010:12).

Pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender oleh wawancara dengan Ir. Wa Ode Muhibbah Suryani, mengungkapkan bahwa kondisi ketidakadilan gender yang masih terjadi dan menyebabkan perempuan dan laki-laki menjadi korban sistem dan struktur sosial yang tidak seimbang di Kota Baubau. Kondisi ini dapat digambarkan melalui porsi dan siklus sosial antara perempuan dan laki-laki yang seharusnya setara, serasi, seimbang, dan harmonis. Pemerintah Kota Baubau melalui DPPPA Kota Baubau, merespon kondisi tersebut dengan menjalankan program "Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan." Pemahaman dan pemenuhan hak-hak perempuan menjadi fokus utama, dengan harapan menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan berkeadilan. Program ini mencakup berbagai aspek, termasuk akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi.

Dalam implementasinya, DPPPA Kota Baubau pada program "Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan" diperoleh informasi dalam wawancara yang dilakukan sebagai rangkaian penelitian ini, menjelaskan bahwa, Program pemberdayaan perempuan di Kota Baubau dirancang untuk menekankan jumlah perempuan dan akses ada sumberdaya yang dapat mereka peroleh, seperti lapangan usaha, kebijakan dan program penguatan kompetensi bagi mereka. Dengan begitu, program tersebut seharusnya menjadi pemantik kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan suatu daerah juga sangat ditentukan oleh peran perempuan disegala bidang. Dalam hasil wawancara juga diperoleh bahwa konteks ini, perempuan memiliki peran strategis yang dapat mendukung kemajuan dan kemakmuran daerah. Dimana menurut salah satu informan, Ir. Wa Ode Muhibbah Suryani berharap perempuan dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri dan menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan peluang.

Pada tahun 2023, Kota Baubau mencatatkan indeks Pembangunan Gender (IDG) sebesar 91,24 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 90,94. Hal ini menunjukkan perbaikan yang terus terjadi di pemerintah kota baubau dalam kaitannya dengan pengarusutamaan gender, yang didalamnya juga turut mendukung keberdayaan kaum perempuan dalam pembangunan daerah. Sejalan dengan ini, informan penelitian yang merupakan Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan PUG DP3A Kota Baubau, Wa Ode Hasnia Boti, menjelaskan bahwa program pemberdayaan perempuan dilakukan dengan melibatkan kegiatan kelembagaan perempuan seperti PEKKA, untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Disisi lain, program tersebut juga dilakukan melalui koordinasi program-program seperti PKHP, evaluasi kinerja PPEP, dan pembinaan lembaga, DPPPA berupaya menjadikan lembaga ini semakin kuat dalam mendukung pemberdayaan perempuan.

Dengan demikian, sejumlah program pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Kota Baubau sejalan dengan "Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan" ini bukan hanya merupakan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, melainkan juga sebuah langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

Tujuan pemberdayaan perempuan ialah untuk membangun akan kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga perempuan bisa mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Nugroho (2008), tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong kaum perempuan untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki agar dapat berperan aktif dalam program pembangunan, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai objek pembangunan seperti yang sering terjadi selama ini.
2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan bertujuan untuk memperkuat posisi tawar-menawar dan keterlibatan mereka dalam setiap aspek pembangunan, baik sebagai perencana, pelaksana maupun dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.
3. Meningkatkan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai sarana pemberdayaan perempuan, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam program-program pembangunan di wilayah tempat tinggal mereka.

Pemberdayaan perempuan kepala keluarga di Kota Baubau dilakukan melalui berbagai inisiatif, termasuk program dari yayasan pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA). Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan, serta membentuk kelompok simpan pinjam untuk mendukung usaha kecil. Selain itu, pelatihan dan pendampingan diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, terutama dalam menghadapi isu sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan.

Pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) di kota baubau berfokus pada peningkatan kesejahteraan melalui berbagai program. Organisasi seperti PEKKA dan DP3A memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ekonomi perempuan.

DP3A di kota baubau melaksanakan beberapa program untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA) antara lain:

1. **Sosialisasi, pembinaan dan pelatihan kepribadian**, mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran perempuan kepala keluarga tentang perlunya berorganisasi. Sementara itu, beberapa perempuan di Kota Baubau menerima pembinaan untuk memberikan arahan awal dan pelatihan kepribadian agar dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat juga memerlukan perilaku moral dan pandangan positif.
2. **Pelatihan dan keterampilan**, menyediakan pelatihan keterampilan, seperti tata boga, kewirausahaan dan penggunaan alat produksi untuk mendukung usaha mandiri.
3. **Pendampingan**, memberikan pendampingan kepada perempuan kepala keluarga melalui coordinator kelompok untuk memastikan informasi dan pelatihan dapat diakses dengan baik. Program-program ini dibuat untuk meningkatkan potensi ekonomi serta kemandirian perempuan yang menjadi kepala keluarga Kota baubau.
4. **Layanan Konsultasi**, Banyak perempuan kepala keluarga yang merasa tertekan karena harus menjalani peran ganda. Layanan konsultasi dapat memberikan ruang bagi mereka



6. **Akses teknologi dan informasi**, kemajuan teknologi mempermudah akses informasi terkait peluang usaha, serta memfasilitasi perempuan untuk menjalankan usaha atau pekerjaan secara online.

b. Faktor penghambat

1. **Rendahnya kualitas sumber daya manusia**, banyak pegawai DP3A yang kurang berlatih dan tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Hal ini mengakibatkan rendahnya efektivitas program pemberdayaan yang dijalankan karena pegawai harus belajar ulang tentang tugas mereka.
2. **Keterbatasan anggaran**, anggaran yang terbatas menghambat pelaksanaan program-program pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengalami kesulitan dalam menyediakan pelatihan, fasilitas, dan layanan yang diperlukan untuk mendukung perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
3. **Kurangnya sarana prasarana**, minimnya rumah aman bagi korban kekerasan mengganggu pemulihan psikologis perempuan yang membutuhkan perlindungan. Tanpa tempat perlindungan yang memadai, perempuan sering kali terpaksa kembali kelingkungan berbahaya yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka
4. **Beban ganda**, perempuan kepala keluarga sering menghadapi beban ganda, yaitu tanggung jawab sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga. Kondisi ini membuat mereka kesulitan untuk fokus mengembangkan potensi diri dan usaha. Waktu dan tenaga mereka sering kali terkuras dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dengan adanya faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan perempuan kepala keluarga, pemberdayaan perempuan di Kota Baubau memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah kota Baubau, tetapi juga lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, serta komunitas lokal, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat upaya-upaya yang dapat meningkatkan akses perempuan kepala keluarga terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta hak-hak sosial dan ekonomi lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perempuan yang menjadi kepala keluarga di Kota Baubau menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga, yang mayoritasnya bekerja di sektor informal. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, mereka tetap memberikan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Pemerintah Kota Baubau melalui DP3A menjalankan program pemberdayaan seperti peningkatan kualitas hidup perempuan dan kerja sama dengan (PEKKA) guna meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian ekonomi perempuan melalui berbagai kegiatan. Meski masih terkendala anggaran, SDM, dan fasilitas.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas hidup di perlukan yang Pertama, mereka perlu mengakses pelatihan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja, terutama di sektor informal. kedua, membangun jaringan dukungan sosial dengan sesama perempuan dan organisasi lokal dapat memberikan akses informasi dan sumber daya yang lebih baik. ketiga, penting untuk memanfaatkan teknologi yang ada seperti Tiktok, shopee, facebook, dan platform digital, untuk memasarkan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka juga harus aktif dalam mengikuti program pemberdayaan yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah, guna mendapatkan dukungan finansial dan pengetahuan yang diperlukan. Dengan adanya langkah-langkah ini, perempuan kepala keluarga dapat memperkuat posisi ekonomi mereka dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. (2010). Sekilas tentang Pemberdayaan Perempuan. 10 Desember 2012 <<http://www.kelurahanpondokbambu.com>>
- Anto, R. P., Harahap, T. K., Sastrini, Y. E., Trisnawati, S. N. I., Ayu, J. D., Sariati, Y., & Mendo, A. Y. (2023). Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki. *Penerbit Tahta Media*.
- Ernawati. (2013). Menyibak Perempuan Kepala Keluarga. *Jurnal Muwazah, Volume 5*.
- Fanaqi, C., mujianto, haryadi, Falahudin, F., Permana, G. A., & Sidiq, N. L. R. . (2023). Increasing Young Entrepreneurs Through the WMP DISPORA Program: Peningkatan Wirausaha Muda Melalui Program WMP DISPORA. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 63–70. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2380>
- Hasan, H. A., & Omar, R. (2018). Dampak Negatif Kredit Mikro Terhadap Keluarga Perempuan Miskin. *PILAR*, 9(1).
- Hubeis, A. V. S. (2010). Pemberdayaan perempuan dari masa ke masa. Bogor: IPB Press.
- Jhonson, L, Leni R. 2010. Keperawatan Keluarga Plus Contoh Askep Keluarga. Yogyakarta: Nuha Medika
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta, UI Press.
- Mulyono, Sungkwo Edy. (2017). Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nugroho. 2008. Gender dan Administrasi Publik Studi tentang Kualitas Kesetaraan dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Onny S. Pujono. 1996. Tari Sufi Sebagai Media Pemberdayaan Perempuan. *Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(1), 1-12.
- Tanjung, 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Telaumbanua, M., & Nugraheni, M. (2018). Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Sosio Informa*, 4(2), 418–436. <https://doi.org/10.33007/inf.v4i2.1474>
- Wasilah, D. (2016). Efektivitas Modal Usaha Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Terhadap Peningkatan Ekonomi. *TAMKIN: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(2), 20-44.
- Zakiyah. 2010. *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*. Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, No. XVII. Diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pemberdayaan-perempuan-tujuan-strategi-program-dan-indikator.html> 11 Desember 2022 pukul 17.00 WIB.